

KEPENTINGAN RUSIA DI TENGAH KONFLIK SIPIL NEGARA UKRAINA DENGAN PEMERINTAHAN SEPARATIS WILAYAH DONETSK

Regiana Revilia, Agus Hadiawan^{a,1}

^a Universitas Lampung, Jalan Prof. Soemantri Brodjonegoro No. 1,
Bandar Lampung, 34597, Indonesia
agushadiawan58@gmail.com¹

ABSTRAK

Kedaulatan sebuah negara di dalam menjalankan pemerintahannya secara internasional dilindungi oleh Piagam PBB pasal 2 ayat 1 dan pasal 7, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131 Tahun 1965. Namun, dibalik hukum kedaulatan tersebut, terjadi sebuah pelanggaran di mana saat konflik sipil berkecamuk di Ukraina, Rusia membantu separatists di salah satu oblast bagian Timur Ukraina, Donetsk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tujuan kebijakan luar negeri Rusia dan kepentingan nasionalnya di wilayah Donetsk, yang diolah ke dalam metode kualitatif deskriptif berdasarkan sumber sekunder seperti Russia Presidential Executive Press Office dan Ukraine Crisis Media Center. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik di Donetsk mengancam kedaulatan Rusia karena berpengaruh pada politik luar negeri serta identitas fisik, politik, dan kultural Rusia di Ukraina.

Kata Kunci: Rusia, Ukraina, Kedaulatan, Kepentingan Nasional

ABSTRACT

Sovereignty of a state on running its governance internationally is protected by article 2 paragraph 4 and article 7 Charter of United Nations, UN General Assembly Resolution No. 2625 of 1970, and UN General Assembly Resolution No. 2131 of 1965. However, behind the sovereignty law, when civil conflict raged in Ukraine, there was a violation by Russian government which was helping separatists in one of oblast of Eastern Ukraine, Donetsk. This study aims to analyze Russia's foreign policy and its interests in Donetsk region during political crisis in Ukraine, by using descriptive qualitative approaches, based on secondary data such as Russia Presidential Executive Press Office dan Ukraine Crisis Media Center. The result of this research shows that conflict in Donetsk threaten Russia's sovereignty, because it affected Russian foreign policy and physical, political and cultural identity in Ukraine.

Keywords: Russia, Ukraine, Sovereignty, National Interest

1. PENDAHULUAN

Permasalahan konflik dengan pihak separatists di wilayah Donetsk, sampai sekarang masih menjadi salah satu persoalan dalam negeri Ukraina. Konflik ini

bahkan sempat menjadi topik pada permasalahan dalam negeri Amerika Serikat di akhir masa kepresidenan Donald Trump yang saat itu diduga menyalahgunakan wewenang kepresidenannya untuk mendesak Volodymyr Zelenskiy, Presiden Ukraina, di dalam membuka penyelidikan dugaan korupsi terhadap Hunter Biden, salah satu komisaris di perusahaan energi Ukraina, *Burisma*, serta anak dari calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden. Sebulan setelah menelepon Zelenskiy, Trump menghentikan bantuan militer bagi Ukraina sebesar US\$250 juta (sekitar Rp3,5 triliun) (CNN Indonesia, 2019).

Mengenai kepentingan bantuan militer Ukraina, hal ini pertama kali dipicu saat Rusia membantu separatist Pro-Rusia di Donetsk, bagian timur Ukraina, pada tahun 2014. Berawal dari krisis politik di Ukraina pada akhir tahun 2013, krisis politik tersebut menyebabkan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych dikudeta dari pemerintahan Ukraina pada tanggal 21 Februari 2014. Setelah itu, ia beserta sejumlah pejabat pendukungnya melarikan diri ke Rusia. (Febriono, 2015: 3)

Selama masa pelarian Yanukovych, parlemen Ukraina meresmikan keputusan bahwa hanya bahasa Ukraina yang akan menjadi bahasa resmi negara (Abdullah, 2014). Kebijakan ini membuat sebagian penduduk di wilayah Ukraina Timur dan Selatan seperti Donetsk, Luhansk, dan Crimea tidak setuju yang kemudian membentuk massa Pro-Moskow dan bergerak menuju protes massal di Kiev, ibukota Ukraina. Peristiwa ini kemudian disebut dengan Revolusi Februari 2014 (Ellis dalam VOX Atlas, 2018).

Sehari setelahnya, pada tanggal 25 Februari 2014 Viktor Yanukovych mengadakan konferensi pers di kota Rostov-on-Don, Rusia, untuk menjelaskan maksud pelariannya meninggalkan Ukraina menuju wilayah Rusia. Di dalam konferensi tersebut, Viktor Yanukovych secara terbuka menyatakan bahwa ia meminta kepada otoritas Rusia untuk memberikan perlindungan dan pemulihan pemerintah yang pernah dipimpinnya, dari ancaman nasionalis dan oposisinya di Ukraina (New York Times, 2014).

Merespon permintaan Presiden Yanukovych, Rusia kemudian menggunakan posisi negaranya sebagai Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat pada tanggal 14 April 2014 mengenai krisis politik Ukraina yang terus meningkat di wilayah Ukraina timur (TEMPO, 2014). Duta Besar Rusia, Vitaly Churkin kemudian menjelaskan akan mengerahkan tentara relawan dengan alasan kemanusiaan. Churkin mengatakan bahwa Yanukovych bahkan menulis sendiri surat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyediakan pasukan menjaga warga yang terjebak perang sipil (BBC News 2014).

Pada tanggal 1 Maret 2014, Dewan Federasi Rusia kemudian mengizinkan penggunaan kekuatan di wilayah Crimea (Marxsen, 2014). Sebulan setelah invasi

Crimea atau pada tanggal 17 April tahun 2014, melalui sebuah sesi tanya jawab yang disiarkan oleh saluran televisi nasional, Putin juga menyatakan kekhawatirannya terhadap krisis yang terjadi di wilayah Donetsk. Putin juga mengingatkan bahwa dia akan mengizinkan penggunaan kekuatan untuk melindungi warga berbahasa Rusia di Ukraina (New York Times, 2014). Salah satu pernyataannya kemudian didokumentasikan oleh New York Times yaitu sebagai berikut:

“We must do everything to help these people to protect their rights and independently determine their own destiny” (Kita harus melakukan segalanya untuk membantu orang-orang ini melindungi hak-hak mereka dan secara mandiri menentukan nasib mereka sendiri).

Pada tanggal 26 Mei 2014, di Bandara Internasional Donetsk terjadi gencatan senjata antara kumpulan massa anti-pemerintah yang membentuk kelompok bersenjata dengan militer dengan tentara Ukraina. Menurut pengakuan pemerintah Ukraina kepada OHCHR, tidak ada kerugian pada militer Ukraina tetapi, terdapat lebih dari 50 korban kelompok-kelompok bersenjata, setidaknya 31 relawan dilaporkan berasal dari Federasi Rusia, termasuk dari Chechnya dan republik-republik lain di Kaukasus Utara. Dari jumlah korban ini, 30 mayat dari mereka belum ditemukan (OHCHR: 2014).

Kondisi ini menyebabkan Uni Eropa dan Amerika Serikat mengumumkan akan merencanakan sanksi terhadap Rusia. Namun, pada tanggal 22 Agustus 2014 Rusia seakan tidak takut dengan ancaman tersebut dan tetap mengirimkan bantuan kema-nusiaan melalui konvoi besar ke kota Donetsk dan Luhansk tanpa izin pemerintah Ukraina (BBC, 2014). Pada tanggal 29 Agustus 2014, melalui laporan resmi Kremlin, Putin kemudian menyerukan para anggota milisi Rusia, untuk ikut serta membantu operasi militer dan kemanusiaan di wilayah Donbas (Donetsk dan Luhansk) (Russia Presidential Executive Press Office, 2014).

Konflik di wilayah Donetsk ini kemudian sempat menuju pada negosiasi damai pada bulan September 2014. Protokol Minsk disepakati pada tanggal 5 September 2014 sebagai upaya menghentikan perang internal di wilayah Donbas, Ukraina. Perundingan ini melibatkan perwakilan pemerintah Ukraina, Rusia, dan kelompok separatis anti pemerintah yang tergabung dalam oposisi Republik Donetsk/DPR dan Republik Lugansk/LPR (Suastha dalam CNN Indonesia, 2016). Namun, pemberontak di wilayah Donetsk melanggar perjanjian 5 September dengan mengadakan pemilihan umum tersendiri terkait otonomi khusus. Pertempuran kemudian terjadi kembali di dekat bandara internasional wilayah Donetsk (Deutsche Welle, 2014).

Konfrontasi kembali terjadi, Pada tanggal 30 November 2014, Tim Pengamat OSCE (*Organization for Security and Cooperation in Europe*) melaporkan bahwa sekitar pukul 09.42 (waktu Moskow), konvoi Rusia yang

terdiri dari 43 kendaraan tiba di *Donetsk Border Crossing Point*. Kendaraan tersebut terdiri dari 21 truk kargo, 18 truk bahan bakar, dan empat kendaraan pendukung. Semua truk kargo memuat tulisan "Bantuan Kemanusiaan dari Federasi Rusia" (OSCE, 2014)

Hubungan yang memanas antara Rusia, Ukraina ini dan wilayah konflik Donetsk, dan Luhansk berlanjut hingga Paket tindakan untuk Implementasi perjanjian Minsk (*Package of measures for the Implementation of the Minsk agreements*), atau dikenal dengan perjanjian Minsk II dibentuk tanggal 11 Februari 2015. Perjanjian Minsk II kemudian dilaksanakan dan disepakati pada tanggal 15 Februari 2015 (Peacemaker United Nations, 2015).

Namun sampai penulis menyelesaikan penelitian ini, Donetsk masih dikuasai oleh pemerintahan separatis dan konfrontasi antara pihak separatis di Donetsk dengan pemerintah Ukraina masih belum benar-benar berakhir. Padahal jika ditinjau dari kedaulatan negara, Hukum internasional sebenarnya sudah mengatur perlindungan pemerintahan suatu negara dari intervensi (ikut campur) negara lain. Hukum kedaulatan negara ini berdasarkan Piagam PBB pasal 2 ayat 7 Piagam PBB yang berbunyi:

“ Tidak ada satu ketentuan-pun dalam Piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri sesuatu negara atau mewajibkan Anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti tercantum dalam Bab VII.” (United Nations Information Centres, 2008).

Selain itu, Resolusi PBB No. 2131 tahun 1965 tentang *Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty* pada pasal 1 dan 2 juga mencantumkan pelarangan keterlibatan negara lain di dalam suatu negara. Pasal tersebut berbunyi:

1. *No State has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic and cultural elements, are condemned.*
2. *No State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights or to secure from it advantages of any kind. Also, no State shall organize, assist, foment, finance, incite or tolerate subversive, terrorist or armed activities directed towards the violent overthrow of the regime of another State, or interfere in civil strife in another State.* (United Nations Resolution dalam UN Documents: Gathering a Body of Global Agreements. Resolution adopted by the General Assembly 2131 (XX))

Penggunaan kekuatan dan mencampuri urusan yuridiksi domestik negara lain juga terkandung di dalam Resolusi PBB No. 2625 tahun 1970 tentang *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*. Resolusi ini memuat 7 Prinsip yaitu sebagai berikut:

- a. *The principle that States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations,*
- b. *The principle that States shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered,*
- c. *The duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter,*
- d. *The duty of States to co-operate with one another in accordance with the Charter,*
- e. *The principle of equal rights and self-determination of peoples,*
- f. *The principle of sovereign equality of States,*
- g. *The principle that States shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the Charter* (United Nations Resolution dalam UN Documents: Gathering a Body of Global Agreements. 2625 (XXV)).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, keterlibatan Rusia ikut campur membantu separatis di wilayah Donetsk pada saat krisis politik di Ukraina secara umum melanggar Piagam PBB pasal 2 ayat 7, prinsip dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970, dan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131 Tahun 1965. Morgenthau, seorang ahli beraliran realis di dalam ilmu hubungan internasional menyatakan bahwa kepentingan nasional adalah bentuk survival suatu negara untuk melindungi identitas fisik (wilayah, tanah, teritorial), identitas politik (eksistensi rezim politik-ekonomi, seperti demokrasi yang kompetitif, komunis, sosialis, otoriter, dan totaliter, dan melindungi identitas kultural (etnis, agama, bahasa, dan norma-norma sejarah negara) (Dirangkum dari buku Morgenthau, 1952: 961-998). Oleh karena itu, dengan menggunakan konsep kepentingan nasional, penelitian ini bertujuan untuk menjawab alasan dibalik kepentingan nasional Rusia membantu separatis wilayah Donetsk saat konflik sipil negara Ukraina dengan melihat kepentingan identitas fisik, politik-ekonomi, dan kultural Rusia di wilayah tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kepentingan nasional Rusia atas wilayah Donetsk yang ada di wilayah Ukraina, sehingga tergolong kedalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi Pustaka dan studi

dokumentasi dengan cara membrowsing website resmi pemerintah Rusia dan Ukraina serta situs-situs resmi lainnya. Adapun Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Matthew B Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana yang terdiri dari tiga aktivitas, yaitu *data condensation*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

3. PEMBAHASAN

Para pembelajar dan praktisi hubungan internasional dengan suara bulat sepakat bahwa justifikasi utama tindakan negara adalah kepentingan nasional. Perbedaan para ahli, pembelajar, maupun praktisi mengenai tindakan negara dan kepentingan nasional adalah ketika membahas mengenai cara pencapaiannya (Ambarwati, dkk., 2010: 83). Pada prinsip keamanan modern, teritorial di dalam kepentingan nasional menurut analisis Risiko Negara, Jamie Scudder adalah negara dipandang sebagai penyedia ruang keamanan menyusul ancaman di ruang batas teritorial negara-bangsa pada suatu wilayah tertentu (Scudder, 2010).

Berdasarkan teori kepentingan nasional Jamie Scudder ini, maka kebijakan luar negeri Rusia ikut terlibat dalam konflik sipil di Donetsk adalah untuk menjaga batas-batas teritorial dari ancaman eksternal. Sejak berakhirnya Perang Dingin, Rusia adalah pewaris sah Uni Soviet. Sebagai pewaris Uni Soviet, Rusia berusaha menjaga negara-negara pecahan Uni Soviet, agar tetap berada dalam lingkaran kekuasaan Rusia dari pengaruh Uni Eropa dan NATO. Secara tradisional ini sesuai konsep identitas kekaisaran terhadap negara penyangga Ukraina dan Belarusia yang dikemukakan oleh ilmuwan politik Andrew Radin dan Clint Reach, yaitu sebagai berikut:

Russian and Western analysts cite a longstanding "imperial" identity, drawing from Russia's imperial expansion in the 16th through 19th centuries and the record of the Soviet Union. Igor Zevelev, former director of the MacArthur Foundation's Russia office, writes that Russian identity includes the "'Little Russians' (Ukrainians), the 'White Russians' (Byelorussians), and the 'Great Russians' (ethnic Russians). (Para analisis Rusia dan Barat mengutip identitas "kekaisaran" yang telah lama ada, yang diambil dari ekspansi kekaisaran Rusia pada abad ke-16 hingga ke-19 dan catatan Uni Soviet. Igor Zevelev, mantan direktur MacArthur Foundation kantor Rusia, menulis bahwa identitas Rusia mencakup "'Rusia Kecil' (Ukraina), 'Rusia Putih' (Byelorussians), dan 'Rusia Besar' (etnis Rusia) (Radin and Reach, 2017: 12).

Selepas Perang Dingin, Rusia berusaha untuk membina hubungan dekat dengan negara-negara bekas Uni Soviet yang lain. Salah satunya adalah pembentukan CIS. CIS adalah singkatan dari *Commonwealth of Independent States* yang dibentuk pada tanggal 21 Desember 1991, menyatukan Rusia, Byelorusia, dan Ukraina yang sepakat menghapuskan sistem Uni Soviet namun

tetap membentuk kesatuan baru melalui Perserikatan Negara-Negara Merdeka (Sefriani, 2016: 289-290).

Rusia sebenarnya menganggap CIS sebagai organisasi supranasional, dengan ia sebagai negara dominan, CIS diharapkan mempunyai struktur birokratis sendiri yang nantinya akan mengkoordinasikan militer, politik, dan kebijakan ekonomi sebagian besar negara bekas Uni Soviet (Subtelny, 2009: 585) Namun, peristiwa Euromaidan yang berujung pada kudeta Viktor Yanukovych dari masa kepresidenan di Ukraina membuat Rusia sadar bahwa antusiasme masyarakat Ukraina yang mendukung integrasi dengan Uni Eropa begitu besar dibandingkan dengan memasuki proses integrasi Rusia (Fisher dalam VOX News, 2014).

Sejak Perang Dingin berakhir, Pemerintah Rusia sangat takut terhadap ekspansi NATO yang semakin mendekati perbatasan Rusia. Banyak warisan Uni Soviet untuk Rusia terpaksa dipindahkan sejak perluasan NATO ke wilayah negara pecahan Uni Soviet. Salah satunya terjadi pada tanggal 10 Maret 2005, ketika parlemen Georgia, salah satu negara pecahan Uni Soviet, menuntut pemerintahannya untuk mengosongkan Pangkalan Militer Rusia di Georgia sebagai bentuk integrasi Georgia ke NATO (Hendrickson and Gordon, 2005: 20).

Akibatnya, Rusia kehilangan Pangkalan Militernya di Akhalkalaki, bagian selatan Georgia yang ditutup pada Juni tahun 2007 dan dipindahkan oleh Rusia ke Gyumri, Armenia. Padahal, Rusia telah banyak kehilangan pangkalan militernya di Georgia, pertama pada masa Uni Soviet, USSR menempatkan 4 pangkalan militernya di Georgia. Setelah Perang Dingin, pangkalan militer di Tbilisi dan Gudauta, yang berada di wilayah Abkhazia ditutup (Antidze, 2007).

Kehadiran NATO sebagai ancaman teritorial Rusia juga dimuat di dalam pernyataan doktrin militer Rusia sendiri yang dibuat bersamaan dengan konflik sipil di Ukraina tahun 2014 sebagai berikut:

“Capacity potential of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and giving it global functions carried out in violation of international law, the approach of military infrastructure countries -members of NATO to the borders of the Russian Federation, including through further expansion of the block” (kapasitas potensial Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan memberikannya fungsi global yang dilakukan dengan melanggar hukum internasional, pendekatan negara-negara infrastruktur militer anggota NATO ke perbatasan Federasi Rusia, termasuk perluasan blok lebih lanjut). (Military Doctrine of the Russian Federation, 2015).

Perluasan NATO ke Ukraina juga akan membuat pangkalan militer Rusia berbatasan langsung dengan NATO. Artinya, Rusia akan menghadapi ancaman langsung. Terutama untuk wilayah Donetsk. Alasan hadirnya Rusia pada konflik di Donetsk adalah untuk menjaga wilayah sekitar Laut Azov yang menghubungkan wilayah Crimea dan Donetsk. Laut Azov penting bagi Rusia

karena merupakan tempat didirikannya Armada Laut Hitam Sevastopol, warisan Uni Soviet yang sekarang menjadi tempat latihan Unit Armada Militer Rusia (Subtelny, 2009: 585).

Pada akhirnya, keterlibatan Rusia di dalam membela separatistis di Donetsk secara teritorial sangat berguna untuk keselamatan negaranya sendiri terhadap ancaman NATO. Sebagai tambahan, sesuai dengan pernyataan Presiden Ukraina yang menjabat saat perang sipil di Donetsk, Petro Poroshenko, melalui laporan berita *Forbes* ia menyatakan bahwa konflik di Donetsk menjadi inisiatif untuk menarik Ukraina dari anggota penuh NATO karena integrasi dengan NATO tidak dapat tercapai selama ada sengketa wilayah (Forbes, 2018).

Kepentingan Nasional sebagai Perlindungan Politik – Ekonomi Rusia di Wilayah Donetsk

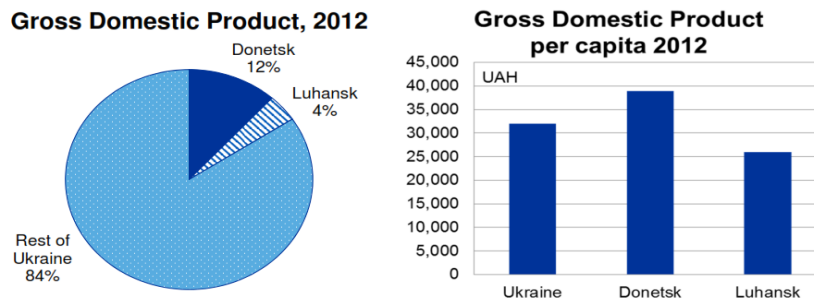
Menurut salah satu peneliti yang dinobatkan sebagai *Excellent Early Career Researcher at the ISA Asia Pacific Conference 2016*, Charles Chong-Han Wu, kepentingan negara tidak diungkapkan oleh pembentukan kekuasaan atau keamanan semata, tetapi juga termasuk masalah ekonomi negara (Wu, 2017: 394). Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa:

we can see that countries do not only have security or political interests but they also pay attention to economic processes and relations, which may bring strong interdependence effects upon states. Both neorealists and neoliberals agree that national security and economic welfare are important to states (kita dapat melihat bahwa negara-negara tidak hanya memiliki kepentingan keamanan atau politik tetapi mereka juga memperhatikan proses ekonomi dan hubungan, yang dapat membawa efek saling ketergantungan yang kuat pada negara. Baik neorealis maupun neoliberal sepakat bahwa keamanan nasional dan kesejahteraan ekonomi penting bagi negara) (Wu, 2017: 394).

Donetsk merupakan salah satu wilayah industri di Ukraina sejak masa Kekaisaran Rusia. Pada tahun 1925 wilayah tersebut dijadikan daerah bernama *Staline*. Selama periode rencana pembangunan lima tahun yang digagas Joseph Stalin, daerah ini menjadi pusat kota. Sebanyak 223 perusahaan dibangun pada akhir tahun 1930. Ketika kota ini diserahkan oleh USSR ke Republik Sosialis Soviet Ukraina, kota ini berubah nama menjadi Donetsk dan menjadi ibukota dari Oblast Donetsk pada tahun 1961. Daerah ini dijadikan salah satu pusat metalurgi, pertambangan batubara, pembangunan mesin, dan industri kimia terbesar di Ukraina (Kubijovyč, 2014).

Sampai tahun 2012, Donetsk adalah wilayah penyumbang sebagian besar PDB di Ukraina. Data tersebut berdasarkan pada penelitian Robert Kirchner dan Ricardo Giucci pada tahun 2014 di bawah ini. Dapat dilihat pada gambar, PDB perkapita

wilayah Donetsk lebih besar dari rata-rata PDB nasional Ukraina. Jika ditotalkan, Donetsk menyumbang 12% dari total PDB di Ukraina (Kirchner, Robert, and Giucci, 2014: 5).



- The Donbas contributes 16% to Ukraine's GDP, with Donetsk's share three times bigger than Luhansk's
- The GDP per capita is in Donetsk higher than the national average, while Luhansk's GDP is lower

Sumber: Kirchner, Robert dan Ricardo Giucci (2014)

Gambar 1. GDP Donetsk dan Luhansk Tahun 2012

Memutus Donetsk dari Ukraina juga secara tidak langsung memutus rantai ekonomi di Ukraina. Melemahkan ekonomi Ukraina akan menciptakan keuntungan politis bagi Rusia karena Ukraina sebagai lawan tidak punya pilihan selain bergantung pada Rusia. Dukungan pemerintah Rusia terhadap separatist di Donetsk ini ternyata terbukti berhasil melemahkan perekonomian di Ukraina. Donetsk, yang dahulu menjadi pusat industri di Ukraina kini dibawah kendali separatist. Sekitar 43 perusahaan industri besar diambil separatist di Donetsk. Akibatnya selain terpaksa meningkatkan pengeluaran pertahanan akibat perang di Donbass, peristiwa di Donetsk ini pada akhirnya menurunkan 20% PDB di Ukraina (Milakovsky, 2019).

Jika dilihat secara politik, keterlibatan Rusia di Donetsk dapat mempercepat proses integrasi wilayah tersebut ke Rusia. Kondisi ini menyebabkan penduduk wilayah Donetsk semakin bergantung pada Rusia. Pada tingkat politik, banyak warga kemudian yang memilih bergantung atau berpindah haluan politik mendukung pihak separatist atau menjadi warga negara Rusia. Kondisi ini membawa serta Rusia kepada keuntungan di dalam melindungi identitas politiknya sebagai strategi regional dan global sebuah negara. Strategi kepentingan politik di Donetsk ini pada akhirnya akan mengarah pada tujuan pertahanan Rusia di dalam menunjukkan kepada Ukraina maupun di dunia bahwa sebagai kekuatan besar saat perang dingin, Rusia masih memiliki kuasa di dalam rezim politik. Pernyataan penulis ini juga sebelumnya telah dipaparkan oleh diplomat Amerika Serikat, Richard Holbrooke, yang bertugas di Bosnia sepanjang negosiasi tahun 1990-an. Ia memandang tujuan utama Rusia yaitu sebagai berikut:

“we felt that Moscow’s primary goal was neither to run nor to wreck the negotiations. Rather, what it wanted most was to restore a sense, however symbolic, that [Russia] still mattered in the world.” (kami merasa bahwa tujuan utama Moskow bukanlah menjalankan atau menghancurkan negosiasi. Sebaliknya, apa yang paling diinginkannya adalah mengembalikan rasa, betapapun simbolisnya, bahwa [Rusia] masih penting di dunia). (Radin, Andrew and Clint Reach, 2017: 17).

Selain melihat pada tingkat politis, jika dilihat dari keuntungan ekonomi, pemisahan Donetsk dari Ukraina membawa keuntungan perekonomian tersendiri bagi Rusia. Hal ini dibuktikan pada pemindahan asset-aset dan kepemilikan perusahaan di Donetsk yang dipindahkan ke Rusia. Saat perang sipil terjadi, sejumlah perusahaan tambang batu bara terendam banjir atau rusak karena perang. Oleh karena itu, untuk melindungi mesin, perangkat, dan dokumentasi milik pabrik, maka beberapa perusahaan yang dikuasai oleh para separatist mulai dipindahkan ke Rusia. Misalnya, semua properti bergerak milik pabrik *"Topaz"*, perusahaan produksi perangkat perang dan elektronik yang terletak di Donetsk ini sepenuhnya dibongkar dan diangkut ke Rusia. Selain di Donetsk, pabrik mesin elektronik di Luhansk, *"Mashzavod-100"* yang juga memproduksi teknologi monokristal juga telah dibongkar dan dipindahkan Rusia jauh ke wilayah Rusia di Chuvashia. Selain Topaz, 20 pabrik lainnya juga dipindahkan ke Rusia, termasuk pabrik kartrid di Luhansk dan pabrik pembangunan mesin, Khartsyzk (Lasocki, 2019).

Kepentingan Nasional sebagai Perlindungan Kultural Rusia di wilayah Donetsk

Menurut Zacher, dukungan untuk norma integritas teritorial umumnya berasal dari keberadaan kelompok etnis yang tumpang tindih dengan perbatasan dan dapat memprovokasi irredentisme teritorial. Kita juga harus menyadari bahwa beberapa kasus potensial revisionisme teritorial dewasa ini berkaitan dengan keinginan untuk menyatukan saudara-saudara etnis di berbagai negara (Zacher, 2001: 241-242). Lebih lanjut Zacher menyatakan integritas teritorial atas perlindungan budaya sebagai berikut:

The use of territorial aggrandizement to achieve strategic gain, or an improvement in a state’s relative power, has concerned the occupation of territories well situated for launching military operations, the exploitation of captured land as a source of national wealth, and the unification of ethnic brethren in other countries so as to increase the state’s population base (Penggunaan peningkatan wilayah untuk mencapai keuntungan strategis, atau peningkatan kekuatan relatif suatu negara, telah menyangkut pendudukan wilayah yang terletak baik untuk meluncurkan operasi militer, eksploitasi tanah yang ditangkap sebagai sumber kekayaan nasional, dan penyatuan saudara-saudara etnis di negara lain untuk meningkatkan basis populasi negara) (Zacher, 2001: 244).

Pada musim panas tahun 1991, masyarakat Rusia menolak kemerdekaan Ukraina (Jose, Betsy and Stefes, 2018: 11). Kemudian, untuk meredakan kelompok massa Rusia yang protes, Presiden Rusia pada masa itu, Boris Yeltsin, memberi wewenang kepada juru bicaranya, Pavel Voshchanov, untuk merilis pernyataan pers terkait kemerdekaan Ukraina dan Kazakhstan. Pernyataan tersebut termuat sebagai berikut:

“ If these republics enter the union with Russia it is not a problem[...]but if they go, we must take care of the population that lives there and not forget that these lands were settled by Russians[...]territories that had once belonged to Russia: Crimea and the Donetsk region of Ukraine, Abkhazia in Georgia, and the northern territories of Kazakhstan.” (Jika republik-republik ini memasuki persatuan dengan Rusia, itu bukan masalah [...] tetapi jika mereka pergi, kita harus menjaga populasi yang tinggal di sana dan tidak lupa bahwa tanah ini dihuni oleh Rusia[...]termasuk wilayah yang pernah menjadi milik Rusia: Crimea dan wilayah Donetsk di Ukraina, Abkhazia di Georgia, dan wilayah utara Kazakhstan). (Jose, Betsy and Stefes, 2018: 11).

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pemerintah Rusia berjanji akan memberikan perlindungan bagi beberapa rakyat yang memiliki mayoritas etnis Rusia di wilayah bagian Ukraina, yaitu Crimea dan Donetsk. Sejak saat itu, pemerintah Rusia memiliki tanggung jawab untuk melindungi kedua wilayah tersebut. termasuk pada konflik di Donetsk.

Identitas Rusia di Donetsk sejak Ukraina merdeka masih sangat kuat di wilayah ini. Hal tersebut dibuktikan dengan sebuah penelitian berjudul *National Identities in Post-Soviet Ukraine: The Case of Lviv and Donetsk* yang ditulis oleh Yaroslav Hrytsak, seorang sejarawan Ukraina, ia menyebutkan bahwa pada tahun 1989 di wilayah Donetsk, 53,5% dari populasi wilayah ini adalah etnis Rusia. Sedangkan Ukraina menjadi etnis minoritas dengan persentase 39,4%. Persentase penutur bahasa Rusia juga sangat dominan di wilayah Donetsk, yaitu sekitar 80,5% (Hrytsak, 1998: 264).

Table 3. How important, in your opinion, are the following for understanding the origins of Ukraine?

<i>Very important</i>	<i>Lviv</i>	<i>Donetsk</i>
Kyivan Rus'	72.7%	77.2%
Cossackdom	74.1%	45.9%
Pereiaslav Treaty (1654)	33.4%	77.7%
Ukrainian National Republic	67.5%	23.3%
Ukrainian Soviet Socialist Republic	19.8%	59.7%
Proclamation of Ukrainian Independence (1991)	90.4%	28.0%

(Sumber: Hrytsak, 1998: 271)

Tabel 1. Survey Kemerdekaan Ukraina di wilayah Lviv dan Donetsk

Bukan hanya secara bahasa, namun Donetsk juga mempunyai masalah kedaulatan sejak merdekanya Ukraina dari Uni Soviet. Hal ini disebabkan oleh karakteristik masyarakat di wilayah Donetsk yang mayoritas beretnis Rusia. Hal tersebut dibuktikan melalui data penelitian di bawah ini, dapat dilihat bahwa di wilayah Donetsk, hanya sekitar 28% penduduk memilih menganggap dirinya sebagai warga Ukraina merdeka.

Berdasarkan data-data tersebut, faktor lebih diterimanya identitas Rusia membuat keterlibatan Rusia di wilayah Donetsk menjadi lebih leluasa di wilayah ini. Keterlibatan Rusia secara jelas terlihat sesudah peristiwa kudeta Presiden Yanukovich, parlemen Ukraina menyatakan bahwa hanya bahasa Ukraina yang akan menjadi bahasa resmi negara (Bachtar, 2014). Banyak warga berbahasa Rusia di selatan dan timur Ukraina memprotes usulan tersebut dan mengganti bendera Ukraina dengan bendera Rusia (Republika, 2014).

Oleh karena itu, ketika krisis di Ukraina terjadi dan parlemen Ukraina sepakat menghapus bahasa Rusia sebagai salah satu bahasa minoritas, Vladimir Putin menyatakan akan melindungi identitas kultural Rusia di wilayah Donetsk tersebut. Adapula pernyataan Vladimir Putin yang lain dan kemudian dinarasikan serta diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh *Business Insider* sebagai berikut:

"I would like to remind you that what was called Novorossiia (New Russia) back in the tsarist days — Kharkov, Lugansk, Donetsk, Kherson, Nikolayev and Odessa — were not part of Ukraine back then. These territories were given to Ukraine in the 1920s by the Soviet government. Why? Who knows. They were won by Potyomkin and Catherine the Great in a series of well-known wars. The centre of that territory was Novorossiysk, so the region is called Novorossiia. Russia lost these territories for various reasons, but the people remained" (Saya ingin mengingatkan kepada hadirin semua bahwa apa yang disebut Novorossiia (Rusia Baru) pada masa Tsar - Kharkov, Lugansk, Donetsk, Kherson, Nikolayev, dan Odessa - bukan bagian dari Ukraina pada waktu itu. Wilayah-wilayah ini diberikan ke Ukraina pada tahun 1920 oleh pemerintah Soviet. Mengapa? Untuk itu tidak ada yang tahu. Pada dasarnya wilayah-wilayah tersebut diperoleh atas kemenangan Potyomkin dan Catherine Agung dalam serangkaian perang terkenal. Pusat wilayah itu adalah Novorossiysk, jadi wilayah itu disebut Novorossiia. Rusia kehilangan wilayah ini karena berbagai alasan, tetapi orang-orang disana tetap ada). (Business Insider, 2015).

Berdasarkan pemaparan sejarah Bahasa dan etnis, maka bisa dilihat bahwa sejak awal terbentuknya wilayah Donetsk, baik masyarakat maupun bahasa di wilayah Donetsk ini sangat dekat dengan Rusia. Oleh karena itu, untuk menjaga basis populasinya di Ukraina, jika dilihat dari *historical values* (nilai-nilai sejarah), keterlibatan Rusia di wilayah Donetsk bertujuan untuk menjaga diaspora bahasa dan etnis di wilayah tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis peneliti terhadap berbagai perpektif, teori, dan konsep kepentingan nasional, bantuan terhadap separatis di Donetsk adalah langkah Kebijakan Luar Negeri Rusia untuk mencapai keuntungan dan perlindungan bagi negara dan tujuan politik Rusia sendiri. Kesimpulan ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

Kepentingan Nasional sebagai Perlindungan Identitas Fisik (Teritori Rusia):

Keputusan membantu separatis di Donetsk adalah untuk menekan ekspansi NATO yang semakin meluas menuju Ukraina. Secara domestik, perluasan NATO di Ukraina akan membuat Rusia berbatasan langsung dengan anggota NATO. Bantuan di Donetsk juga dapat menghambat integrasi NATO di Ukraina karena integrasi tersebut tidak akan tercapai selama adanya sengketa wilayah.

Kepentingan Nasional sebagai Perlindungan Identitas Politik - Ekonomi

Rusia: Secara politis tujuan bantuan di Donetsk juga dapat menyebabkan krisis di Ukraina yang kemudian memaksa negara ini mengubah haluan politiknya untuk kembali pada keanggotaan maupun pengaruh yang dibentuk Rusia. Selain itu, keuntungan ekonominya, pemberian bantuan akan memudahkan proses kepemilikan dan pemindahan sejumlah aset ekonomi Ukraina di wilayah Donetsk ke wilayah Rusia.

Kepentingan Nasional sebagai Perlindungan Identitas Kultural Rusia:

Rusia membuat kebijakan politik berdasarkan pada komitmen saat perpecahan Uni Soviet di mana pemerintah Rusia akan melindungi populasi etnis Rusia di Donetsk. Karakteristik wilayah Donetsk yang sebagian besar memiliki identitas etnis dan penutur bahasa Rusia adalah sebuah keuntungan populasi bagi Rusia. Bantuan di Donetsk diberikan untuk menekan undang-undang penghapusan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi serta mencegah eskalasi berlanjut terhadap kehancuran warisan bahasa Rusia di wilayah Donetsk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambarwati, dkk. (2010). *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hendrickson, Gordon B. (2005). *The Future of NATO-Russia Relations: Or, How to Dance With a Bear and Not Get Mauled*. United States of America: The Atlantic Council of the United States
- Hrytsak, Yaroslav. (1998). *National Identities in Post-Soviet Ukraine: The Case of Lviv and Donetsk*. Cambridge: Harvard Ukrainian Research Institute.

- Kirchner, Robert dan Ricardo Giucci. (2014). *The Economy of the Donbas in Figures*. Berlin: Institute for Economic Research and Policy Consulting.
- Morgenthau. (1952). *Another Great Debate: The National Interest of United States*. United States: American Political Science Review. Hal 961-998.
- Radin, Andrew and Clint Reach. (2017). *Russian Views of the International Order*. California: RAND Corporation. Hal 12.
- Scudder, Jamie. (2010). *Territorial Integrity – Modern States and the International System*. Diambil kembali dari Exploring Geopolitics: https://exploringgeopolitics.org/publication_scudder_jamie_territorial_integrity_modern_states_international_political_system_jurisdiction_peace_westphalia_lebanon_somalia/
- Sefriani. (2016). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar – Ed. Revisi*. Jakarta: Rajawali Press
- Subtelny, Orest. (2009). *Ukraine: A History - fourth edition*. Canada: University of Toronto Press
- Wu, Charles Chong-Han. (2017). *Understanding the Structures and Contents of National Interests: An Analysis of Structural Equation Modeling*. South Korea: The Korean Journal of International Studies. Hal 394.
- Zacher, Mark W. (2001). *The Territorial Integrity Norm: International Boundaries and the Use of Force*. Cambridge: The MIT Press

Jurnal

- Christian Marxsen. 2014. *The Crimea Crisis: An International Law Perspective*. https://www.mpil.de/files/pdf4/Marxsen_2014_-_The_crimea_crisis_-_an_international_law_perspective.pdf
- Febriono, Tri Agung. (2015). *Tindakan Rusia Memberikan Suaka Politik Kepada Mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych Tahun 2014*. Jurnal diambil kembali dari MediaNeliti: <https://media.neliti.com/media/publications/32740-ID-tindakan-rusia-memberikan-suaka-politik-kepada-mantan-presiden-ukraina-viktor-ya.pdf>
- Jose, Betsy and Christoph H. Stefes. (2018). *Russian Norm Entrepreneurship in Crimea: Serious Contestation or Cheap Talk?* Diambil kembali dari GIGA Working Papers: https://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications/wp311_jose-stefes.pdf.
- Milakovsky, Brian. (2019). *A Cost-Benefit Analysis for Russia of the Donbas Economic Blockade*. Diambil kembali dari Wilson Center:

<https://www.wilsoncenter.org/blog-post/cost-benefit-analysis-for-russia-the-donbas-economic-blockade>

Mohammad Mulyadi. (2011). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*. Indonesia: Jurnal Studi Komunikasi Dan Media Vol. 15 No. 1 (Januari – Juni 2011) Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Informatika. Jurnal dapat diunduh di: <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/150106>

Laporan atau Undang-Undang Resmi

Military Doctrine of the Russian Federation. (2015). Doktrin militer dapat diakses di: <https://www.offiziere.ch/wp-content/uploads-001/2015/08/Russia-s-2014-Military-Doctrine.pdf>

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2014). Report on the human rights situation in Ukraine 15 April 2014. Diambil kembali dari OHCHR: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_Report_15April2014.doc.

OSCE Observer Mission at the Russian Checkpoints Gukovo and Donetsk. (2014). *Spot report by OSCE Observer Mission at the Russian Checkpoints Gukovo and Donetsk, 30 November 2014: Russian convoy of 43 vehicles crossed into Ukraine and returned back through the Donetsk Border Crossing Point*. Diambil kembali dari OSCE: <https://www.osce.org/om/128381>

Russia Presidential Executive Press Office. (2014). President of Russia Vladimir Putin addressed Novorossiia militia. Diambil kembali dari Russia Presidential Executive Press Office: <http://en.kremlin.ru/events/president/news/46506>

United Nations Information Centres, Publications in Local Languages. (2008). Charter of the United Nations – Bahasa Indonesia. Data diambil kembali dari United Nations Information Centres: https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jaka_rta_charter_bahasa.pdf

United Nations Resolution dalam UN Documents: Gathering a Body of Global Agreements. Resolution adopted by the General Assembly 2131 (XX). *Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty*. Diambil kembali dari UN Documents: Gathering a Body of Global Agreements: <http://www.un-documents.net/a20r2131.htm>

United Nations Resolution dalam UN Documents: Gathering a Body of Global Agreements. 2625 (XXV). *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations*. Diambil kembali dari UN Documents: Gathering a Body of Global Agreements: <http://www.un-documents.net/a25r2625.htm>

Sumber Online

CNN Indonesia. 2019. *Membedah Skandal Ukraina yang Ancam Makzulkan Trump*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190925082213-134-433686/membedah-skandal-ukraina-yang-ancam-makzulkan-trump>

Sam Ellis. (2018). Why Ukraine is trapped in endless conflict. Narasi diambil kembali dari video VOX Atlas: <https://www.youtube.com/watch?v=Fb9U1uoYCOc>

New York Times. (2014). *Ousted Ukrainian Leader, Reappearing in Russia, Says, 'Nobody Deposed Me.'* Diambil kembali dari New York Times: <https://www.nytimes.com/2014/03/01/world/europe/russia-ukraine.html>

BBC News. (2014). Ukraine's Yanukovych asked for troops, Russia tells UN. Diambil Kembali dari BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-europe-26427848>

TEMPO. (2014). Agar Rusia Tak Merajalela di Ukraina. Diambil kembali dari TEMPO: <https://majalah.tempo.co/read/146231/agar-rusia-tak-merajalela-di-ukraina&user=register?hidden=login>

New York Times. (2014). Putin on Eastern Ukraine. Narasi Narasi diambil kembali dari video New York Times – News Clips: <https://www.nytimes.com/video/world/europe/100000002831541/putin-on-eastern-ukraine.html>

BBC. (2014). Ukraine crisis: Timeline. Diambil kembali dari BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275>

Riva Dessthania Suastha dalam CNN Indonesia. (2016). *Krisis Ukraina Berkepanjangan, Rusia Enggan Disalahkan*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161130145604-106-176388/krisis-ukraina-berkepanjangan-rusia-enggan-disalahkan>.

Deutsche Welle. (2014). Ukraine ceasefire crumbles, fighting continues in Donetsk. Diambil kembali dari Deutsche Welle: <https://www.dw.com/en/ukraine-ceasefire-crumbles-fighting-continues-in-donetsk/a-18040139>

- Fisher, Max. (2014). *Everything you need to know about the Ukraine crisis*. Diambil kembali dari VOX News: <https://www.vox.com/2014/9/3/18088560/ukraine-everything-you-need-to-know>
- Antidze, Margarita. (2007). Russia closes last military base in Georgia. Diambil kembali dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-georgia-russia-bases/russia-closes-last-militarybase-in-georgia-idUSL1387605220071113>
- Forbes. (2018). Who Profits From The Broken Russia-Ukraine Peace Deal? Diambil kembali dari Forbes: <https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2018/01/26/who-profits-fromthe-broken-russia-ukraine-peace-deal/#27134d6a37d4>
- Lasocki, Janek. (2019). The cost of five years of war in Donbas. Diambil kembali dari New Eastern Europe: <https://neweasterneurope.eu/2019/09/24/the-cost-of-five-years-of-war-in-donbas/>
- Kubijovyč, Volodymyr. (2014). Donetsk. Diambil kembali dari Encyclopedia of Ukraine: <http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CD%5CO%5CDonetsk.htm>
- Bachtar Abdullah. (2014). *Kemelut Ukraina: Ukraina Hanya Memakai Bahasa Ukraina*. Diambil kembali dari Inilah.com: <http://m.inilah.com/news/detail/2078472/ukraina-hanya-memakai-bahasa-ukraina>
- Business Insider. (2015). *Putin's dream of reuniting the Russian empire is falling apart*. Diambil kembali dari Business Insider: <https://www.businessinsider.com/putin-puts-novorossiia-project-put-on-hold-20155?IR=T>
- Republika. 2014. *Rusia Protes Rencana Kebijakan Bahasa di Ukraina, Kenapa?* <https://republika.co.id/berita/n11ndp/rusia-protes-rencana-kebijakan-bahasa-di-ukraina-kenapa>

